

KENAIKAN PBB

TUAI POLEMIK

Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi sorotan publik. Seperti di Pati, Jawa Tengah rencana penyesuaian tarif PBB hingga 250% dan sempat memicu gelombang protes besar-besaran. Ternyata, Pati bukan satu-satunya daerah yang mengalami kenaikan PBB signifikan, namun ada beberapa daerah lain yang juga terjadi lonjakan pajak cukup signifikan hingga meresahkan dan memberatkan warganya. Nah, yang awal mencuat adalah di Pati ada kenaikan 250 persen dan Berujung Pembatalan, kemudian Kabupaten Semarang juga ada lonjakan tagihan PBB lebih dari 400 persen. Selanjutnya ada Kota Cirebon, bahkan kenaikan PBB hingga 1.000 persen. Dan Kabupaten yang PBB-nya naik sekitar 400 persen. Kenaikan PBB-P2 yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) ini menuai polemik. Warga di berbagai wilayah memprotes lonjakan tarif pajak yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat. Beberapa daerah bahkan mengalami gelombang penolakan dan desakan revisi atas kebijakan tersebut. Selain empat daerah tersebut, akankah kenaikan PBB ini terjadi di daerah lainnya? Untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan upaya identifikasi daerah-daerah mana lagi yang mengalami kenaikan PBB, Kamis (14/8/2025). Tak hanya itu, istana juga angkat bicara untuk membantah bahwa kenaikan PBB tersebut adalah imbas dari efisiensi anggaran dari pemerintah.

BACA HAL 11...

Daftar Daerah dengan Kenaikan PBB Tertinggi 2025

- o PATI (JATENG)**
 Kenaikan $\pm 250\%$, dibatalkan usai protes besar.
- o SEMARANG (JATENG)**
 Tagihan naik $>400\%$ (Rp161 ribu $\rightarrow$ Rp872 ribu), akibat perubahan fungsi lahan & penilaian ulang.
- o CIREBON (JABAR)**
 Naik hingga 1.000% (Rp6,2 juta $\rightarrow$ Rp65 juta).
- o JOMBANG (JATIM)**
 Naik $\pm 225\%$ (Rp400 ribu $\rightarrow$ Rp1,3 juta), imbas penyesuaian NJOP sesuai Perda 2023 & appraisal 2022.

PBB

ISTANA ANGKAT BICARA SOAL BUPATI PATI

Sikap dan kebijakan Bupati Pati Sudewo terhadap masyarakatnya memantik reaksi dari kalangan istana atau pemerintah pusat. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto pun turut memberikan komentar, demikian juga dengan beberapa menteri. Istana pun mengimbau kepala daerah untuk lebih bijak dalam menanggapi protes masyarakat.

“**P**residen Prabowo menyayangkan sikap arogan Sudewo. Dia meminta agar permasalahan ini segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak luas.

Merespons hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah hingga stakeholder terkait terhadap demo yang terjadi kemarin, Rabu (13/8/2025). Termasuk dalam hal kebijakan yang diambil.

“Permasalahan kebijakan yang diambil Bupati Pati tentu yang pertama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri baik pak Bupati secara personal kami berkomunikasi terus. Saya memonitor terus berkomunikasi dengan bapak gubernur Jawa Tengah, semoga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik,” kata Prasetyo, di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

Prasetyo juga menjelaskan pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait imbas dari kebijakan yang mau dijalankan.

“Memang koordinasi bukan dalam rangka mencari rumusannya tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah. Tapi bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah di situlah kemudian kita berkoordinasi sangat intens,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga membantah anggapan kenaikan PBB-P2 itu disebabkan dari dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat.

“Efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk dua kabupaten kota, tapi untuk lima ratusan kabupaten kota, untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik satu kejadian, seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal,” kata Hasan, Kamis (14/8/2025).

Jika ini merupakan efek dari kebijakan pemerintah pusat, lanjut Prasetyo, maka akan berpengaruh terhadap ratusan kabupaten dan kota lainnya.

Untuk itu ditegaskan, kebijakan itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Bahkan seharusnya kebijakan itu sudah dikoordinasikan dengan DPRD daerahnya.

“Biasanya mereka juga membuat ini berdasarkan Perda. Kalau berdasarkan Perda itu kan Bupati bersepakat memutuskan ini dengan DPRD. Kan begitu. Jadi elected office di sana yang sudah berunding,” kata Hasan.

“Jadi ini tidak bisa kemudian langsung dengan tuduhan prematur seperti itu. Maka itu yang saya bilang bahwa kebijakan ini kebijakan daerah, dan kalau ada kejadian di Pati itu murni dinamika lokal,” sambungnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian juga angkat bicara. Dia mengaku telah menegur langsung Bupati Pati, Sudewo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

“Saya langsung telepon Pak Bupati Pati (Sudewo), Pak Gubernur Jawa Tengah (Ahmad Luthfi). Saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu,”



Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi

katanya saat ditemui di Jakarta Utara seperti dirilis Antara, Kamis (14/8/2025).

Dia mengaku juga menanyakan apakah kebijakan tersebut telah diperhitungkan atau tidak. Pada akhirnya, kebijakan tersebut dicabut oleh Bupati Pati.

Mantan Kapolri itu mengungkapkan, pihaknya tengah meneliti kenaikan PBB tersebut lantaran peraturan dari bupati mengenai nilai jual objek pajak (NJOP) dan PBB, tidak sampai pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Jadi peraturan daerahnya memang dibuat oleh DPRD, tapi bersifat umum dan penentuan tarifnya oleh kabupaten dan kota. Penentuan angka NJOP dan PBB itu ditentukan oleh bupati dan wali kota dengan konsultasi. Yang review adalah gubernur, makanya tidak sampai ke saya tapi ke gubernur,” katanya.

Maka dari itu, ujar Tito, siang ini pihaknya akan melaksanakan pertemuan secara daring bersama seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi daerah mana saja yang mengalami kenaikan PBB.

“Ini harus betul-betul melihat salah satu klausul dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), itu bahwa setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, misalnya pajak dan retribusi, itu harus ada proses sosialisasi. Kedua, memper-

KISRUH PBB PATI & RESPONS ISTANA

- **Reaksi Istana:**
Presiden Prabowo menyayangkan sikap arogan Bupati Pati Sudewo dan meminta masalah segera diselesaikan.
- **Koordinasi Pusat-Daerah:**
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berkoordinasi dengan Gubernur Jateng dan Mendagri terkait demo di Pati.
- **Kebijakan Daerah:**
Istana menegaskan kenaikan PBB-P2 di Pati adalah murni kebijakan daerah, bukan dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat.
- **Proses Penetapan PBB:**
Mendagri Tito Karnavian menegur langsung Bupati Pati dan memastikan kebijakan dicabut. Tarif PBB ditentukan bupati/wali kota, direview gubernur.
- **Arahan Mendagri:**
Seluruh kepala daerah diminta memastikan kebijakan pajak/retribusi melalui sosialisasi dan mempertimbangkan dampak ekonomi masyarakat.
- **Aksi Protes Warga:**
Ribuan warga Pati demo di Alun-alun pada 13 Agustus 2025 menuntut Sudewo mundur. Aksi berujung ricuh dan bentrok dengan aparat.



timbangkan betul dampak serta kemampuan ekonomi masyarakat. Ini yang kami nilai,” ujarnya.

Diketahui, Pada Rabu (13/8/2025), warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya buntut dari polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). (han,its/lut)

MEGAWATI LANTIK HASTO SEBAGAI SEKJEN PDIP PERIODE 2025-2030

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk lima tahun ke depan dan melantiknya pada Kamis (14/8/2025). Dengan demikian, Hasto menjabat Sekjen untuk periode ketiga.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo. Saat dihubungi, Ganjar membenarkan bahwa pleno langsung diikuti prosesi pelantikan.

"Tadi langsung pelantikan. Dilanjut rapat pleno pertama," ujar Ganjar, Kamis (14/8/2025).

Hasto pertama kali menjabat sebagai Sekjen PDIP sejak 2015,



Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri saat akan melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen, Kamis (14/8/2025).

menggantikan Tjahjo Kumolo yang kala itu diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Ia kembali dipercaya memegang posisi tersebut pada Kongres V PDIP tahun 2019.

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi DPP PDIP, Adian Napitupulu juga membenarkan pelantikan Hasto. "Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030," lanjut Adian.

Selain itu, Megawati juga melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu.

Menurut Adian, ada kejadian menarik saat Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmono selesai membaca nama-nama pengurus dan meminta mereka untuk maju. "Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi, dan Mas Nanan (M. Prananda Prabowo, Ketua DPP yang juga putra Megawati) bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu Ibu Megawati menjawab singkat, "Ya Mas Hasto," papar Adian.

Keputusan itu, lanjut Adian, langsung disambut senyum oleh semua yang hadir. Kemudian Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan.

Adian menuturkan, momen itu mencerminkan kepercayaan penuh Megawati terhadap Hasto Kristiyanto yang telah menjabat sebagai Sekjen sejak 2015. Kini, ia resmi melanjutkan tugasnya untuk periode ketiga berturut-turut.

Selain Hasto, Megawati juga melantik sejumlah pengurus DPP PDIP Perjuangan masa bakti 2025-2030 yang belum dilantik secara resmi. Di antaranya Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Darmadi Duriyanto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

Lalu ada Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM, Andreas Hugo Pareira sebagai

Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal.

Selain itu, ada pula Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan, dan Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini. (han,ist/lut)

STRUKTUR LENGKAP DPP PDIP 2025-2030

- Ketua Umum: **Megawati Soekarnoputri**
- Sekretaris Jenderal: **Hasto Kristiyanto**
- Bendahara Umum: **Olly Dondokambey**
- Beberapa nama pengurus DPP lainnya:
- **Puan Maharani**
Ketua Bidang Politik
- **Ganjar Pranowo**
Ketua Bidang Pemerintahan & Otonomi Daerah
- **Ahmad Basarah**
Ketua Bidang Luar Negeri
- **Djarot Saiful Hidayat**
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi
- **Basuki Tjahaja Purnama**
Ketua Bidang Perekonomian
- **Tri Rismaharini**
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana
- **Andreas Hugo Pareira**
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi
- **Muhammad Prananda Prabowo**
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital
- **Rano Karno**
Ketua Bidang Kebudayaan



PDIP PERJUANGAN

80
Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

TAHUN
64
GATHER AS ONE
TOGETHER WE THRIVE

**Dirgahayu
ke-80 Republik Indonesia
dan ke-64 Bank Jatim**

Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju
Gather As One Together We Thrive

14044 0811-3222-2505

Unduh Sekarang Juga!
#SemuaBisaDimanaAja

Bank Jatim berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia
Bank Jatim merupakan peserta penjaminan LPS



Menteri PKP Maruarar Sirait (kiri) dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah

BEDA DATA MENTERI ARA DAN WAKILNYA SOAL KINERJA

Dua petinggi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan data berbeda soal kinerjanya. Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah menyebut kinerja kementeriannya masih nol karena terlalu fokus pada kegiatan CSR. Merespons penilaian itu, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara meminta wakilnya memeriksa data kembali.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) buka suara terkait kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah belum berjalan sampai saat ini.

Hal tersebut bermula saat Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum merealisasikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan bagian dari program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Fahri mengaku sangat pesimis bahwa BSPS itu bisa terlaksana dalam waktu dekat. Pasalnya, kata dia, aturan dan dukungan teknis untuk merealisasikan BSPS tersebut masih dibuat.

"Saya terus terang saja, karena ini adalah anggaran yang harusnya mulai Januari bisa dieksekusi. (Tapi) sampai sekarang belum jalan, ya. Saya minta maaf tadi, saya bilang ini memang key performance index (KPI) inti kami belum," ucap Fahri saat ditemui di kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

"Terus terang aja, kita ini yang KPI kita aja itu kan masih nol, tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU masih nol gitu," tegasnya.

Dia pun belum bisa memastikan apakah nantinya BSPS yang menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah dapat direalisasikan pada kuartal III-2025 ini.

"Nanti boleh ditanya teknis ke

teman-teman lapangan, ya. Kalau uangnya, kan, ada, tapi itu pun tidak banyak, ya," katanya.

Menurutnya, selama ini kinerja Kementerian PKP justru tak sesuai dengan KPI yang seharusnya. "Kita nampak sibuk ngurus CSR, ngurus macam-macam, padahal itu bukan KPI kita. Termasuk tadi yang ditanyakan

(soal rumah subsidi 200 ribu unit) bukan KPI kita, itu kan (KPI) Tapera, institusi di luar kita, seharusnya kita fokus kepada apa yang seharusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita," lanjut Fahri.

Menteri Ara pun memberikan respons. Menurut dia, capaian kinerja kementerian yang dipimpinnya bisa dilihat melalui data yang telah disampaikan selama ini. Meski begitu, Ara tidak membeberkan lebih lanjut data apa yang dimaksud.

"Lihat datanya saja. Datanya, kan, sudah disampaikan," jawab singkat Ara saat ditemui di kantor InJourney, Jakarta, Kamis, 14 Agustus.

Saat ditanyai lebih lanjut apakah data yang dimaksud merupakan milik BP Tapera, Ara membenarkan hal tersebut. "Iya, dong. Lihat datanya saja," pungkas dia. (wid,ist,kum/dya)

Tuding BP Tapera Bohong

TAK hanya itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membohongi Menteri PKP Maruarar Sirait. Hal itu terkait tugas BP Tapera yang menyalurkan rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) seolah-olah menjadi tugas Kementerian PKP.

Fahri menegaskan bahwa BP Tapera merupakan sebuah badan yang tidak termasuk dan bukan tanggung jawab Kementerian PKP. Keduanya juga memiliki tugas yang jelas berbeda.

Menurut Fahri, tugas dari Kementerian PKP adalah renovasi rumah, penataan kawasan, serta pemberian fasilitas umum untuk perumahan. Sementara itu, BP Tapera bertugas untuk mengelola dana anggota Tapera yang saat ini masih berasal dari PNS karena lembaga tersebut dulunya merupakan Badan Pertimbangan

Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Selain mengelola dana anggota Tapera, badan tersebut juga diberi kewenangan untuk mengelola dana FLPP yang berasal dari Kementerian Keuangan.

"Kayaknya (BP) Tapera ini kebanyakan ngebohongin Pak Menteri gitu loh. Terus, salah terus ini kan. Tapera itu kan institusi di luar kita, kok kayak dia yang dominan, kayak FLPP segala-galanya. FLPP itu kan di luar kita," ujar di Kemenko IPK, Jakarta.

Fahri berpendapat, tugas Kementerian PKP hanya membantu BP Tapera mendapatkan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk menyalurkan bantuan subsidi rumah. Akan tetapi, kini seolah-olah FLPP juga termasuk dalam tugas Kementerian PKP.

"Itu bohong dia. Termasuk dia memakai mekanisme untuk ngasih kuota-kuota. Itu kan nggak boleh sembarangan," ungkap Fahri.

Fahri mengatakan untuk bisa

CAPAIAN PROGRAM SEBELUMNYA

Data Kementerian PUPR, 2021-2024

2024

1.042.738

2023

1.217.794

2022

1.117.491

2021

1.105.707

membeli rumah subsidi, calon pembeli harus menjadi anggota Tapera terlebih dahulu setidaknya selama setahun. Ia mencontohkan sistem Tapera ini selayaknya mendaftar haji, harus ada antrean terlebih dahulu.

Fahri juga menyoroti berubahnya gaji minimal yang bisa membeli rumah subsidi yang saat ini di kawasan Jabodetabek bisa mencapai Rp 14 juta per bulan untuk yang sudah menikah. Menurutnya gaji segitu sudah jauh di atas upah minimum provinsi.

Sebagai informasi, sebelumnya batas atas gaji maksimum penerima bantuan rumah subsidi adalah Rp 8 juta per bulan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 22 tahun 2023. Lalu, aturan tersebut direvisi melalui Peraturan Menteri PKP No. 5 Tahun 2025 yang menetapkan batas maksimal gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 14 juta per bulan untuk yang sudah menikah. (wid,rls,ist/dya)

Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

BARU 2 HARI JADI DIRUT KAI, BOBBY DIPANGGIL KPK

Bobby Rasyidin yang baru dua hari lalu diangkat jadi Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI, harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim penyidik memanggilnya dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT LEN Industri (Persero) dalam kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pihaknya menjadwalkan pemeriksaan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin Kamis (14/8/2025).

Bukan terkait kereta api, tapi pemeriksaan tersebut untuk mendalami kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018-2023.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis hari ini.

Bobby diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) yang merupakan induk holding Defend ID. Erick Thohir memberikan posisi strategis Bobby Rasyidin di Len Industri melalui Surat Keputusan



Menteri BUMN Nomor: SK-388/MBU/12/2020 tertanggal 10 Desember 2020.

elain Bobby, KPK juga memanggil 3 saksi lainnya, yaitu karya PT Telkom Judi Achmadi, SVP Solution Delivery

PT Sigma Cipta Caraka Binsar Pardede, dan Vp Procurement PT Sigma Cipta Caraka Heri Purnomo.

KPK telah menyidik perkara korupsi digitalisasi SPBU Pertamina ini sejak Januari 2025 lalu. Namun hingga saat ini, belum ada satu pun tersangka yang mereka umumkan ke publik.

KPK telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Di antaranya Koordinator Pengawasan BBM pada BPH Migas Agustinus Yanuar Mahendratama; Head of Outbound Purchasing PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) periode 2018-2020 Aily Sutedia; VP Corporate Holding and Portfolio IA PT Pertamina Anton Triend;

Ada pula VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga Aribawa; Direktur PT Dabir Delisha Indonesia periode 2018-2020 Asrul Sani; Direktur Sales and Marketing PT Pins Indonesia periode 2016-2019 Benny Antoro; serta Komisararis PT Ladang Usaha Jaya Bersama Charles Setiawan.

Awal Kasus

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pelanggaran persaingan usaha dan korupsi dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina (Persero) senilai Rp 3,6 triliun. Proyek yang berlangsung sejak 31 Agustus 2018 ini diduga ada pelanggaran dan diskriminasi dalam penunjukan langsung kepada PT Telkom Indonesia (Persero) untuk menggarap pengadaan ini.

KPPU mengatakan pelanggaran oleh Pertamina dalam kasus ini adalah penunjukan langsung dalam pengadaan, sehingga mengarah pada diskriminasi. Fenomena ini, kata

Deswin, melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Proyek digitalisasi SPBU Pertamina secara umum mencakup pengadaan sistem near real-time monitoring distribusi dan penjualan BBM di 5.518 SPBU Pertamina dari total sekitar 7.000 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Telkom menggarap infrastruktur digital SPBU, Data Center, konektivitas di 5.518 SPBU atau 75.000 nozzle di seluruh Indonesia, hingga pemeliharaan selama jangka waktu perjanjian. Adapun tujuan utama dilaksanakan proyek tersebut untuk memantau sekaligus mengawasi konsumsi BBM khususnya solar subsidi di setiap SPBU.

Dalam proyek tersebut, Pertamina menempuh mekanisme penunjukan langsung salah satu entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). KPPU menilai langkah ini tak mempertimbangkan berbagai pelaku usaha lain yang memiliki potensi dan kemampuan menggarap proyek tersebut.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sedang mendalami dugaan perkara korupsi proyek Digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018-2023. KPK pun telah memanggil beberapa saksi, termasuk Head Legal PT Telkomsigma Wisnu Kamulyan pada Mei 2025 lalu. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Mei 2025.

KPK menyidik perkara korupsi digitalisasi SPBU Pertamina ini sejak Januari lalu. Namun hingga saat ini, belum ada satu pun tersangka yang mereka umumkan ke publik.

KPK pun telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Di antaranya Koordinator Pengawasan BBM pada BPH Migas Agustinus Yanuar Mahendratama; Head of Outbound Purchasing PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) periode 2018-2020 Aily Sutedia; VP Corporate Holding and Portfolio IA PT Pertamina Anton Triend; VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga Aribawa; Direktur PT Dabir Delisha Indonesia periode 2018-2020 Asrul Sani; Direktur Sales and Marketing PT Pins Indonesia periode 2016-2019 Benny Antoro; serta Komisararis PT Ladang Usaha Jaya Bersama Charles Setiawan.(wid,rla,tmo/dya)

KPK
Dinas Kelautan & Perikanan
Provinsi Jawa Timur

DIRGAHAYU

REPUBLIK INDONESIA

17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2025

80

**Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju**

Dr Ir Muhammad Isa Anshori, ATD., MT
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

MINAT RENDAH, CKG KABUPATEN MALANG BARU JANGKAU 15% DARI 2,7 JUTA PENDUDUK



(Ilustrasi) Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis kepada anak-anak sekolah di Kabupaten Malang. (Santi/Lentera)

MALANG - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Malang baru menjangkau sekitar 15 persen dari total 2,7 juta penduduk. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Ivan Drie, mengungkapkan sejumlah kendala salah satunya rendahnya minat masyarakat.

Meski layanan CKG mencakup pemeriksaan kesehatan lengkap, banyak warga yang enggan memanfaatkannya. "Minatnya rendah,

ada rasa takut, ya. Padahal juga nggak diapa-apain. Nggak bayar, sudah dipastikan gratis, tapi tetap takut," ujarnya, dikutip pada Kamis (14/8/2025).

Dinkes Kabupaten Malang juga mengakui, sosialisasi telah dilakukan secara maksimal. Namun, di sejumlah wilayah pelosok, meski warga sudah mengetahui adanya program CKG, sebagian masih bersikap acuh tak acuh.

"Kalau sosialisasi saya kira kami sudah maksimal. Tetapi ternyata pada beberapa titik di wilayah yang paling ujung itu mereka tahu, tetapi masih yang acuh tak acuh," ungkap Ivan.

Disebutkan Ivan, kendala lainnya adalah pada sistem pencatatan data menggunakan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK). Menurutnya, capaian riil di lapangan kemungkinan lebih tinggi, tetapi angka resmi baru dihitung oleh pemerintah pusat setelah data masuk

ke aplikasi tersebut.

"Dalam penerapannya masih ada banyak kendala, loading, muter-muter terus. Mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi ke depannya," jelasnya.

Ia mencontohkan, saat Dinkes menyasar peserta didik di sekolah-sekolah, jumlah peserta yang ikut cukup banyak. Namun, karena aplikasi tidak berfungsi optimal, pencatatan terpaksa dilakukan secara manual.

Untuk diketahui, dikutip dari laman indonesia.go.id, sejak diluncurkan enam bulan lalu, program CKG telah menjangkau 16,4 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Perluasan layanan ke satuan pendidikan secara serentak juga telah dimulai pada 4 Agustus 2025 lalu. Dengan target menyentuh seluruh populasi Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa setiap tahunnya.

Lebih lanjut, Ivan menargetkan capaian CKG di Kabupaten Malang dapat mencapai 30-40 persen hingga akhir tahun 2025 ini. Untuk itu, menurutnya diperlukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk menyasar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Malang.

"Paling tidak kita bisa mencapai kurang lebih 30-40 persen itu sebenarnya sudah bagus. Makanya kami butuh sinergi lagi dengan pihak-pihak yang lain, termasuk menyasar ASN Kabupaten Malang," katanya.

Sebagai langkah percepatan dengan menyasar para ASN, Dinkes Kabupaten Malang akan menggelar CKG yang direncanakan berlangsung di dua pendopo milik Pemkab Malang. Yakni Pendopo Agung di Jalan Merdeka Kota Malang dan pendopo di Kepanjen.

"Saya sudah bersurat kepada Sekda, mudah-mudahan secepatnya, dalam waktu dekat bisa dilaksanakan," kata Ivan. Menurutnya, ASN menjadi sasaran prioritas karena lebih mudah dijangkau dibanding kelompok masyarakat lainnya.

Ditambahkannya, setiap hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti untuk dirujuk ke Puskesmas ataupun ke Rumah Sakit (RS). "Semisal ada kelainan di telinga, itu ada saran untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Puskesmas dan itu juga gratis. Kecuali kalau ada kasus spesialistik yang harus dirujuk ke RS," tegasnya. (Santi/Dya)

KABAR BAIK! 200 GURU HONORER KOTA MALANG DIUSULKAN MASUK FORMASI PPPK PARUH WAKTU

MALANG- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mengungkapkan masih ada hampir 200 guru berstatus honorer. Seluruhnya akan diusulkan masuk ke formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

"Di kami masih ada guru honorer. Hampir 200 an orang, lah. Nanti akan dimasuki ke formasi PPPK paruh waktu. Ini yang kemarin tidak lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024," ujar Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, Kamis (14/8/2025).

Menurutnya, ketersediaan guru Kota Malang saat ini dinilai masih mencukupi untuk kebutuhan pembelajaran. Namun, Suwarjana memperkirakan jumlah tersebut akan berkurang pada bulan depan karena adanya guru yang memasuki masa pensiun.

Disebutkannya, rata-rata, setiap bulan terdapat sekitar 20 guru yang pensiun. Kondisi ini, menurutnya berpotensi mengganggu efektivitas pembelajaran jika tidak segera diantisipasi.

"Per bulan itu yang pensiun sekitar 20 orang. Kalau sekarang ada yang pensiun dan tidak ada yang mengajar, dirangkap terus kan tidak mungkin efektif," katanya.

Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga pendidik, pihaknya telah mengusulkan seluruh guru honorer tersebut agar bisa masuk dalam formasi PPPK paruh waktu. "Ya tetap kami usulkan semua. Mudah-mudahan bisa masuk semua. Karena dari pemerintah daerah sudah harus tidak ada pengangkatan honorer," tegas Suwarjana.

Terpisah, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Hendru Martono, menjelaskan PPPK paruh waktu merupakan kebijakan pemerintah pusat bagi tenaga non ASN yang tidak tersedia formasinya untuk PPPK penuh waktu.

"Kalau tidak tersedia formasinya maka dimasukkan ke paruh waktu. Gaji mengikuti dengan gaji honor sekarang. Mereka tidak masuk belanja

pegawai," jelas Hendru.

Ditegaskannya, meski secara teknis hampir mirip dengan tenaga honorer, PPPK paruh waktu memiliki status hukum yang lebih jelas. "Tetap legal dan sudah sah. Prosesnya sama dengan PPPK, nanti informasinya juga ada Nomor Induk Pegawai (NIP). Gaji honorer di Kota Malang juga sudah UMR, paling tinggi Rp3,5 juta," katanya.

Hendru menambahkan, PPPK paruh waktu juga tetap memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu jika tersedia formasi dan melalui proses yang berlaku.

Meski jumlah guru honorer cukup besar, Hendru menyebut tenaga non-ASN di Kota Malang secara keseluruhan tidak sampai 500 orang. Jumlah tersebut termasuk tenaga teknis di perangkat daerah lain.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana. (Santi/Lentera)

Namun, ia menekankan tidak semua tenaga non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu, karena status mereka tergantung sumber anggaran yang membiayai. "Misalnya di RS ada pegawai non-ASN tapi digaji melalui BLUD, itu tidak termasuk. Nanti kita pilah," kata Hendru. (Santi/Dya)



Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung (tengah) dan istrinya Kim Hye-Kyung (kiri) tiba untuk upacara peringatan Hari Pahlawan ke-70 di Pemakaman Nasional Seoul di Seoul, Korea Selatan, 6 Juni 2025. Foto: (Reuters)

KORSEL BERTEKAD REBUT KEMBALI OPCON DARI AS

Korea Selatan bertekad untuk mendapatkan kembali kendali operasional militer masa perang (OPCON) dari Amerika Serikat selama masa kepemimpinan Presiden Lee Jae Myung, dikutip dari Korea Times pada Kamis (14/8/2025).

menghentikan siaran propaganda, Seoul melaporkan bahwa Korea Utara mulai melepas pengeras suara di sepanjang perbatasan. Korea Utara juga berhenti menerbangkan balon berisi sampah ke wilayah Korea Selatan.

Seoul turut menekankan "diplomasi pragmatis" untuk meningkatkan Korea Selatan sebagai kekuatan diplomatik setingkat "G7 plus" dan membangun kekuatan militer elite yang mampu menangkal ancaman nuklir, misil, dan siber dari Korea Utara.

Secara khusus, Lee dijadwalkan terbang ke Jepang minggu depan untuk menggelar pertemuan puncak

dua hari dengan Perdana Menteri Shigeru Ishiba pada 23-24 Agustus, sebelum ia terbang ke AS untuk pertemuan puncak pertamanya dengan Presiden Donald Trump.

Ini akan menjadi pertama kalinya seorang presiden Korea Selatan mengunjungi Jepang sebelum bertemu dengan pemimpin AS.

Adapun untuk mencapai target dalam cetak biru tersebut, pemerintahan Lee diperkirakan memerlukan perubahan terhadap 951 undang-undang dan peraturan, serta anggaran terpisah sekitar 152 miliar dolar AS (sekitar Rp2.447,9 triliun) hingga tahun 2030. (Anadolu, Antara, Korea Times, ist/nei)

selebaran anti-Pyongyang melintasi perbatasan, serta membongkar infrastruktur siaran propaganda sebuah inisiatif yang dibalas dengan tindakan serupa oleh Korea Utara.

Pemerintah juga menunda sebagian latihan gabungan dengan AS, latihan yang sering dikritik oleh Korea Utara.

Meskipun Pyongyang juga telah

Pemerintahan Lee bertekad mengambil kembali kendali operasional masa perang dalam periode jabatannya, sesuai dengan cetak biru peta jalan kebijakan lima tahun yang dipublikasikan oleh Komite Perencanaan Urusan Negara.

Meski begitu, cetak biru tersebut belum menjadi kebijakan final pemerintah dan masih harus melewati proses peninjauan sebelum berpotensi disahkan oleh kabinet Lee.

Lee terpilih dalam pemilu presiden mendadak pada Juni setelah pendahulunya, Yoon Suk Yeol, dimakzulkan karena upaya memberlakukan darurat militer yang gagal pada Desember lalu.

Korea Selatan adalah salah satu sekutu militer tertua Amerika Serikat dengan lebih dari 28.500 tentara AS ditempatkan di Semenanjung Korea. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan memegang kendali operasional OPCON di masa damai, sementara Komando Pasukan Gabungan yang dipimpin AS memegang kendali selama masa perang.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh parlemen, Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back menyampaikan bahwa pemerintahan Lee akan berupaya mengambil kembali kendali operasional masa perang, yang akan membutuhkan pembicaraan mendalam dengan Amerika Serikat.

Peta jalan tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Lee berkomitmen untuk "menormalkan" hubungan dengan Korea Utara dengan beralih ke arah rekonsiliasi dan kerja sama.

"Dengan melembagakan perdamaian dan koeksistensi, pemerintah akan berupaya mengubah apa yang disebut 'risiko Semenanjung Korea' menjadi 'keunggulan Semenanjung Korea'," menurut Komite Perencanaan Urusan Negara.

Segera setelah terpilih sebagai presiden, Lee melarang pengiriman

Korut Tegas Bantah Cabut Pengeras Suara Propaganda

Penampakan speaker propaganda di perbatasan Korut-Korsel. (Foto: AFP)



KOREA Selatan mengklaim Korea Utara telah mencabut pengeras suara propaganda di area perbatasan, namun pernyataan tersebut dibantah oleh Pyongyang.

"Kami tidak pernah menyingkirkan pengeras suara yang dipasang di wilayah perbatasan dan kami tidak berniat untuk menyingkirkannya," kata adik pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un, Kim Yo-jong, dalam keterangan yang dilaporkan kantor berita KCNA.

"Korsel baru-baru ini mencoba menyesatkan opini publik dengan mengatakan bahwa tindakan baik dan kebijakan peredaannya

ditanggapi, serta menciptakan opini publik bahwa hubungan Korut-Korsel sedang dipulihkan," katanya lagi, dikutip dari AFP, Kamis (14/8/2025).

"Kami telah mengklarifikasi beberapa kali bahwa kami tidak punya keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Korsel, dan pendirian serta sudut pandang konklusif ini akan ditetapkan dalam konstitusi kami di masa depan," lanjutnya.

Pernyataan ini dirilis jelang latihan gabungan militer Korsel dan AS yang rencananya akan digelar pada 18-28 Agustus mendatang.

"Terlepas apakah Korsel menyingkirkan pengeras suara atau tidak, menghentikan siaran [propaganda] atau tidak, menunda latihan militer atau tidak dan mengurangi skalanya atau tidak, kami tidak peduli dan tidak tertarik," ujar Kim Yo-jong.

Tanggapan Korsel terhadap pernyataan Kim Yo-jong tetap

diplomatis. Pemerintah Korsel menyatakan akan tetap mengupayakan langkah-langkah normalisasi dan stabilisasi dengan Korut.

"Selama tiga tahun terakhir, hubungan antar-Korea telah terkunci dalam kebuntuan garis keras. Untuk mengubahnya menjadi periode dialog dan keterlibatan, kami harus menghadapi situasi ini dengan tenang dan perspektif jangka panjang," kata pejabat dari Kementerian Unifikasi Korsel kepada wartawan.

Hubungan Korsel dan Korut memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, Korut mengirim ribuan balon yang berisi sampah ke Korsel. Balon berisi sampah itu merupakan tindakan balasan atas balon propaganda anti-Korut yang dikirim aktivis Korsel.

Korsel kemudian menyalakan pengeras suara siaran propaganda untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir termasuk menyiarkan lagu K-Pop dan berita internasional. Sebagai balasannya, Korut juga mulai menyiarkan suara-suara aneh di sepanjang perbatasan yang meresahkan penduduk Korsel.

Menyiarkan propaganda lewat pengeras suara merupakan taktik yang dilakukan sejak Perang Korea. (KCNA, AFP, ist/nei)



Hindari Diet Ekstrem Ini, Bisa Mengancam Kesehatan

Dalam usaha menurunkan berat badan atau mempertahankan bentuk tubuh ideal, banyak orang mencoba berbagai metode diet, termasuk yang tergolong ekstrem, untuk membatasi asupan kalori. Langkah ini sering dilakukan demi hasil cepat, meski belum tentu aman bagi kesehatan.

Diet ekstrem merupakan pola makan yang membatasi kalori secara drastis, mengurangi atau menghilangkan jenis makanan tertentu, atau mengubah pola makan secara tidak seimbang. Metode ini umumnya tidak direkomendasikan untuk dijalani dalam jangka panjang karena berisiko mengganggu fungsi tubuh.

Meskipun diet ekstrem dapat memberikan hasil penurunan berat badan yang cepat, risiko yang ditimbulkan sering kali lebih besar daripada manfaatnya. Menurut berbagai sumber terpercaya, ada sejumlah jenis diet ekstrem yang sebaiknya dihindari demi menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Diet Bebas Gluten

Dinukil dari Siloam Hospital, jenis diet ini sebenarnya dianjurkan untuk orang dengan intoleransi gluten atau penyakit celiac. Jika tidak untuk alasan medis, diet ini justru berisiko mengurangi asupan biji-bijian bergizi, serat, dan mikronutrien penting. Biji-bijian berperan penting untuk mencegah penyakit jantung dan diabetes dengan menurunkan

kolesterol serta mengatur gula darah.

Beberapa produk bebas gluten justru mengandung banyak natrium, gula, dan lemak tidak sehat yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan, gangguan gula darah, dan tekanan darah tinggi. Jadi, label bebas gluten tidak selalu menjamin makanan tersebut sehat.

Diet Paleo

Jenis diet ini adalah salah satu diet yang berpotensi membahayakan kesehatan. Konsep diet paleo meniru pola makan manusia zaman batu atau paleolitikum yang mengonsumsi makanan dari alam, seperti daging, sayuran, dan ikan hasil buruan. Beberapa versi bahkan menganjurkan makan daging atau protein mentah, yang risiko kesehatannya tinggi jika bahan tidak segar atau kurang higienis.

Diet ini dapat menimbulkan gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, dan ketidakseimbangan bakteri usus karena rendah karbohidrat dan serat larut.

Diet Keto

Diet keto adalah pola makan yang membatasi konsumsi karbohidrat kurang dari 50 gram per hari dan meningkatkan asupan lemak. Tubuh yang kekurangan glukosa kemudian membakar lemak dan protein sebagai energi. Awalnya dibuat untuk pasien epilepsi, kini diet ini populer untuk menurunkan berat badan. Namun, diet keto hanya dianjurkan dalam jangka pendek, antara dua hingga tiga minggu,

maksimal 6 hingga 12 bulan.

Jika dijalani terlalu lama, diet ini bisa menimbulkan efek samping serius, seperti sakit kepala, mual, muntah, gangguan pencernaan, dan penyusutan massa otot. Risiko lain termasuk tekanan darah rendah, batu ginjal, sembelit, kekurangan nutrisi, serta gangguan jantung. Diet keto juga dapat memicu isolasi sosial dan gangguan pola makan pada sebagian orang. Orang dengan penyakit pada pankreas, hati, tiroid, atau kandung empedu disarankan tidak menjalani diet ini.

Diet Mayo

Diet mayo menekankan pembatasan konsumsi garam dan mengutamakan makanan rendah karbohidrat. Metode ini membuat asupan natrium berkurang secara signifikan, sehingga memicu tubuh mengeluarkan cairan lebih cepat.

Akibatnya, penurunan berat badan yang terjadi bukan disebabkan oleh pembakaran lemak, melainkan karena hilangnya cairan tubuh. Kondisi ini berisiko menimbulkan dehidrasi, rasa lemas, dan penurunan konsentrasi.

Diet HCG

Dikutip dari Web MD, diet HCG menggabungkan pembatasan kalori yang sangat ketat dengan penggunaan obat human chorionic gonadotropin (hCG) yang biasanya diberikan kepada wanita hamil. Studi menunjukkan bahwa obat ini tidak efektif untuk menurunkan berat badan dan dapat

menimbulkan efek samping seperti kelelahan berat, mudah marah, gelisah, hingga depresi.

Selain itu, penggunaan obat hCG juga berpotensi menyebabkan penumpukan cairan dan pembekuan darah. Pembatasan kalori yang ekstrem dalam diet ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan secara keseluruhan, sehingga metode ini dinilai tidak aman untuk diterapkan.

Diet Cuka Sari Apel

Beberapa orang mengonsumsi cuka sari apel sebelum makan dengan harapan dapat mengurangi nafsu makan dan membantu pembakaran lemak. Namun, bukti ilmiah yang mendukung efektivitas cara ini masih sangat terbatas. Meski umumnya aman, konsumsi cuka sari apel dalam jangka panjang dapat mengganggu kerja insulin dan obat tekanan darah, serta memicu hipoglikemia dan hipokalemia. Kandungan asam yang tinggi juga berisiko merusak tenggorokan.

Diet Kafein

Minum kopi dalam jumlah banyak dapat membantu menekan nafsu makan dan sedikit meningkatkan pembakaran kalori. Namun, efek ini tidak cukup kuat untuk menghasilkan penurunan berat badan yang signifikan. Konsumsi kafein secara berlebihan dapat memicu peningkatan tekanan darah, menyebabkan mual, serta gangguan tidur. (nei,ist/dya)

REAKTOR NUKLIR NASA DI BULAN, APA FUNGSINYA?

NASA tengah mempercepat rencana pembangunan reaktor nuklir di Bulan sebagai bagian dari upaya mendukung eksplorasi luar angkasa jangka panjang. Reaktor ini dirancang untuk menjadi sumber energi utama yang stabil dan andal di lingkungan Bulan yang ekstrem.

Sumber daya tersebut nantinya akan digunakan untuk mengoperasikan pangkalan permanen yang diproyeksikan mulai dibangun sekitar tahun 2030. Dengan adanya pasokan energi mandiri, misi penelitian dan keberlangsungan hidup astronot di Bulan diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, badan antariksa Amerika Serikat itu memang telah mengembangkan sistem fusi bertenaga 40 kilowatt yang ditargetkan meluncur ke Bulan pada awal 2030-an. Namun, rencana ini tampaknya akan dipercepat.

Menurut laporan Politico, Kepala

Sementara NASA, Sean Duffy, dalam waktu dekat akan mengumumkan arahan baru yang dinilai jauh lebih ambisius. Kebijakan ini menandai langkah besar dalam pengembangan teknologi energi luar angkasa yang dapat mendukung misi eksplorasi jangka panjang.

Arahan tersebut memerintahkan NASA untuk mengajukan permintaan proposal kepada industri terkait pembangunan reaktor nuklir bertenaga 100 kilowatt. Targetnya, reaktor ini harus siap diluncurkan paling lambat pada 2030, bertepatan dengan rencana kembalinya para astronot menginjakkan kaki di permukaan Bulan.

Langkah ini menjadi bagian dari misi besar NASA, Program Artemis, yang bertujuan mengembalikan astronot ke Bulan dan membangun satu atau lebih pangkalan permanen di sana.

Tenaga nuklir dianggap krusial untuk mewujudkan visi ini. Panel surya bukan pilihan ideal untuk pangkalan berawak karena rotasi Bulan yang lambat membuat malam di Bulan berlangsung sekitar dua minggu waktu Bumi, terlalu lama untuk mengandalkan cahaya Matahari.

China, bersama Rusia dan beberapa negara lain, juga berencana membangun pangkalan di Bulan. Arahan baru Duffy bertujuan untuk memastikan AS bergerak lebih cepat dibanding China.

Bahkan, arahan itu mengemperingatkan bahwa negara pertama yang berhasil mengoperasikan reaktor di Bulan berpotensi menetapkan zona larangan masuk yang bisa

membatasi pergerakan Amerika Serikat secara signifikan.

Duffy, mantan pembawa acara Fox Business Channel sekaligus bintang Reality Show Real World: Boston, yang kini menjabat Menteri Perhubungan AS, ditunjuk Presiden Donald Trump sebagai Administrator Sementara NASA pada 9 Juli 2025 lalu.

Penunjukan ini terjadi lima minggu setelah Trump menarik pencalonan kepala NASA sebelumnya, miliarder sekaligus astronot swasta Jared Isaacman. Keputusan mengejutkan itu datang hanya sekitar satu minggu sebelum Isaacman dijadwalkan mendapat persetujuan Senat AS.

Dengan kompetisi internasional yang semakin memanas, percepatan proyek reaktor nuklir ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga strategi geopolitik luar angkasa. Pertanyaannya, siapa yang akan lebih dulu menyalakan listrik di Bulan? (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL.

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Jelajahi Lokasi Syuting Wednesday Season 2 di Irlandia



Musim kedua serial Wednesday resmi tayang di Netflix pada Rabu, 6 Agustus 2025. Tidak seperti musim pertama yang mengambil lokasi syuting di Rumania, para co-creator Alfred Gough dan Miles Millar kali ini memilih Irlandia untuk menghadirkan latar kastil megah dan hutan kota Jericho, Vermont.

Pada musim kedua ini, Wednesday Addams (Jenna Ortega) kembali ke Nevermore Academy untuk memecahkan misteri dan menghadapi berbagai peristiwa menegangkan. Ceritanya mencakup kemunculan penguntit,

teror burung gagak hitam, kematian misterius seorang detektif, hingga mimpi aneh yang berkaitan dengan kamar sekamarnya, Enid (Emma Myers). Selain Jenna Ortega, deretan pemeran lainnya meliputi Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie, Christina Ricci, Fred Armisen, dan masih banyak lagi.

Kastil Charleville, County Offaly

Nevermore Academy dalam musim kedua direkam di Kastil Charleville bergaya gotik di County Offaly, Irlandia tengah. "Lokasinya sangat cocok dengan lokasi yang mereka gunakan untuk Nevermore di Rumania tahun lalu," kata manajer lokasi pengawas, Maria O'Connor. Namun mereka harus mencocokkan tampilan gerbang sekolah dan hutan di sekitarnya. Beruntung, mereka dapat menemukan lokasi yang secara tak terduga mirip di sebuah perkebunan pribadi di County

Wicklow. Selain itu, Kastil ini menawarkan tur berpemandu yang menceritakan sejarahnya, detail arsitekturnya, dan kisah-kisah hantu yang terkenal.

Trinity College Dublin

Di awal episode menampilkan adegan Wednesday akan bepergian dengan pesawat terbang. Namun dia harus tertahan saat petugas memeriksanya dengan detektor logam di Bandara Newark. Adegan itu tidak diambil di Bandara Dublin karena terlalu ramai untuk syuting. O'Connor mengatakan kampus ini memiliki meja keamanan untuk sehingga bisa diubah menjadi area check-in maskapai.

Selain itu, di Trinity College Dublin, Anda bisa mengunjungi Perpustakaan Tua dan melihat Book of Kells serta Long Room yang ikonik. Ikuti tur berjalan kaki bersama pemandu untuk menjelajahi kampus bersejarah atau berjalan sendiri menikmati bangunan abad ke-17 dan ke-18 di area seluas 47 hektar.

County Wicklow

Rumah Kansas City Scalper (Haley Joel Osment) di pinggiran Kansas sebenarnya adalah perumahan yang cantik di kota Newcastle, County Wicklow. Tim produksi pun merapikan jalan agar terkesan lebih kumuh dan mengubah taman depan mereka. "Syuting di sana berlangsung pada hari pertama produksi. [Penduduk setempat] tidak percaya bahwa hari Wednesday akan tiba di jalan mereka. Semua anak sangat gembira," kata

O'Connor. Selain itu, County Wicklow menyajikan beragam wisata alam, sejarah, dan rekreasi. Taman Nasional Pegunungan Wicklow menawarkan jalur indah seperti Sally Gap, Danau Tay, dan berbagai rute pendakian. Di dalamnya terdapat Glendalough, lembah dengan dua danau dan reruntuhan biara abad ke-6. Powerscourt Estate memikat dengan taman-taman kelas dunia dan Air Terjun Powerscourt yang tertinggi di Irlandia.

Powerscourt House

Adegan para murid Nevermore menuju Camp Jericho dan bertarung dengan sekelompok kadet dilakukan di Powerscourt House. Kawasan ini merupakan perkebunan abad ke-18 yang banyak dikunjungi

. Terkenal dengan tamannya yang indah, air terjun yang spektakuler, dan pepohonan redwood yang megah di hutan sekitarnya. Air Terjun Powerscourt, air terjun tertinggi kedua di Irlandia, juga sempat ditampilkan dalam adegan tersebut.

Selain Wednesday musim kedua, tempat ini juga pernah digunakan untuk syuting film-film klasik seperti Henry V dan Excalibur karya Laurence Olivier, dan film-film yang lebih baru seperti Little Women (2017), Cocaine Bear dan The Green Knight.

Selain itu, Powerscourt Estate menawarkan beragam aktivitas, mulai dari menjelajahi Powerscourt House & Gardens seluas 47 hektar dengan taman Italia, taman Jepang, Danau Triton, hingga menikmati kuliner di Avoca Terrace Café. Sekitar 6 km dari rumah

utama, Air Terjun Powerscourt—tertinggi di Irlandia—menjadi spot ideal untuk piknik dan menikmati alam.

Clermont House, Rathnew

Rumah pedesaan ini menjadi lokasi syuting untuk adegan adik Wednesday, Pugsley, membesarkan zombi pemakan otak di sebuah gubuk di tanah Nevermore.

Clermont House bergaya Palladian abad ke-18 yang dulunya merupakan sekolah. Selain untuk set zombi, rumah ini juga digunakan set rumah sakit dan untuk adegan konferensi pers sheriff.

Namun, Clermont House di Rathnew, County Wicklow, adalah bangunan bernilai sejarah dan arsitektur, namun tidak dibuka untuk umum atau beroperasi sebagai objek wisata.

Tidak ada tur atau fasilitas pengunjung, dan informasi yang tersedia hanya memuat detail arsitektur serta riwayatnya.

Cloragh Woods

Morticia (Catherine Zeta-Jones) menjadi salah satu staf Nevermore. Dia pun mendapat tempat tinggal khusus, yang dibangun dalam bentuk miniatur di Cloragh Woods.

Namun, Cloragh Woods adalah hutan pribadi yang dikelola secara berkelanjutan dan tidak dibuka untuk umum. Informasinya lebih fokus pada manajemen hutan, sementara untuk aktivitas hiking, lokasi seperti Cruagh Woods atau Curragh Wood lebih direkomendasikan. (nei,ist/dya)

Kenaikan PBB (dari Hal 1) ...

Polemik kenaikan PBB-P2 yang terjadi cukup besar adalah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kenaikan PBB ini bermula dari awal Agustus 2025, saat itu Bupati Pati, Sudewo, mengumumkan kenaikan PBB-P2 sebesar hampir 250%, alasan utamanya karena tarif pajak tak diubah sejak 14 tahun lalu dengan target meningkatkan pendapatan daerah.

Keputusan Bupati Sudewo itu memancing reaksi dari warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka melakukan aksi protes dengan mendirikan posko di Alun-Alun Pati untuk menggalang dana dan menyiapkan logistik untuk aksidemo.

Rencana demo mendapatkan tanggapan dari Bupati Sudewo yang menyatakan "tidak gentar" meski ratusan ribu orang unjuk rasa, pernyataan ini memicu kemarahan warga. Kemudian pada 8 Agustus, Sudewo membatalkan kenaikan dan menjanjikan pengembalian selisih pembayaran bagi warga yang sudah membayar lebih.

Meski pencabutan sudah terjadi, demo tetap terjadi pada 13 Agustus. Massa menuntut Bupati mundur, bahkan melempari botol saat Sudewo muncul untuk meminta maaf. Aksi massa ini juga mendapat tanggapan dari DPRD Kabupaten Pati yang langsung membentuk panitia khusus pemakzulan (hak angket). Tak hanya itu, Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengatakan melakukan pengusutan dugaan korupsi Sudewo.

Selain di Kabupaten Pati, polemik kenaikan PBB juga terjadi di Kabupaten Semarang yang terjadi lonjakan tagihan lebih dari 400 persen. Dilansir dari Kompas (12/8/2025), Tukimah (69), warga Baran Kauman, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, kaget saat menerima Surat Pemberitahuan PBB tahun 2025, yang mencapai Rp 872.000. Tagihan tersebut naik 400 persen dibandingkan dengan tagihan tahun sebelumnya yaitu Rp161.000.

"Terus terang saat menerima surat PBB dan melihat angka pembayarannya kok naik banyak, saya kaget dan merasa keberatan," ujar Tukimah, Selasa (12/8/2025).

Tukimah pun mengajukan keberatan, namun hingga kini belum mendapat jawaban. "Soal PBB ini telah diuruskan anak saya, tapi belum tahu hasilnya," katanya.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Rudibdo, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB. "Sehingga para wajib pajak di Kabupaten Semarang tidak perlu mencemaskan

atas kewajibannya tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, obyek pajak tanah milik Tukimah mengalami perubahan setelah dilakukan penghitungan ulang. Fokus penilaian ulang obyek PBB di Kabupaten Semarang adalah pada bidang yang mengalami perubahan fungsi.

"Kebetulan obyek pajak tersebut ada di jalan utama akses pariwisata dan jalan provinsi. Sehingga obyek pajak tersebut ada di klaster kedua setelah klaster jalan nasional dan luasannya lebih dari 1.000 meter persegi," katanya.

Awalnya, lahan tersebut hanya memiliki satu bangunan rumah. Kini, sudah ada tiga bangunan yang dihuni tiga kepala keluarga (KK). "Saat penghitungan belum dilakukan pemecahan, sehingga Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)-nya masih muncul global atau menjadi satu. Penilaiannya didasarkan pada harga transaksi riil yang terjadi di lingkungan tersebut, kemudian dilakukan verifikasi ulang di lapangan oleh petugas penilai pajak," jelasnya.

Kemudian di Kota Cirebon juga terjadi polemik dimana PBB Naik hingga 1.000%. Hal ini mendapatkan aksi protes dari Paguyuban Pelangi Kota Cirebon. Mereka menilai kenaikan drastis tersebut membebani warga, apalagi jika dibandingkan dengan Pati yang memilih membatalkan kenaikan 250%.

Salah satu warga yang mengalami kenaikan PBB hingga 1000 persen itu adalah Darma Suryapranata yang mengatakan rumahnya yang berada di kawasan Siliwangi, Kota Cirebon, mengalami kenaikan PBB dari semula Rp6,2 juta jadi Rp65 juta. "Tahun 2023 itu hanya enam juta dua ratus. Kemudian tahun 2024 Rp65 juta. Naiknya 1.000 persen lebih," ujar pria 83 tahun itu dengan nada heran, Rabu (13/8/2025) malam seperti dikutip dari detikJabar.

Juru bicara Paguyuban Pelangi, Hetta Mahendrati, mengatakan Darma Suryapranata bukan satu-satunya warga yang terdampak. Banyak warga lain mengalami hal serupa, bahkan ada yang kenaikannya mencapai 700 persen. "Pak Surya (Darma Suryapranata) hanya salah satu contoh. Ada juga yang naik 700 persen," kata Hetta.

Terpisah, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan pihaknya telah membahas persoalan kenaikan PBB yang dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, kebijakan kenaikan tersebut merupakan aturan yang telah ditetapkan sejak tahun lalu. "Kebijakan kenaikan PBB itu kan satu tahun yang lalu. Namun saya sebagai kepala daerah yang baru, sudah satu bulan yang lalu membahas tentang PBB tersebut," kata Edo.

Ia menegaskan akan mengkaji

aturan terkait kenaikan PBB dengan harapan kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat. "Mudah-mudahan formulasi yang kita buat sesuai dengan keinginan masyarakat. Kemarin saya sudah bicarakan semuanya tentang PBB," kata Edo dilansir cnnindonesia, Kamis (14/8/2025).

Di Jawa Timur juga muncul polemik terkait kenaikan PBB, yaitu di Kabupaten Jombang. Protes warga terhadap kenaikan pajak dilakukan dengan cara unik. Fattah Rochim, warga Desa Pulolor, membayar pajak PBB-P2 rumahnya yang melonjak dari Rp 400 ribu menjadi Rp 1,3 juta dengan uang koin dari celengan anaknya. Aksi ini viral di media sosial dan menjadi simbol penolakan masyarakat terhadap kenaikan pajak yang dianggap tidak wajar.

Bupati Jombang, Warsubi, mengatakan bahwa kenaikan drastis itu berdasarkan hasil Peraturan Daerah (Perda) tahun 2023. Ketentuan tentang kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merujuk pada kenaikan tarif PBB-P2 adalah hasil penaksiran tim appraisal tahun 2022.

Hasilnya itu kemudian menjadi salah satu rujukan dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Pemkab Jombang kemudian menerbitkan regulasi pungutan pajak, dengan diterbitkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Pungutan Pajak Daerah. Peraturan Bupati Jombang tersebut kemudian diberlakukan sepanjang 2024.

"Saat ini di Kabupaten Jombang PBB-P2 itu berdasarkan hasil Perda tahun 2023. Sudah berjalan di tahun 2024 dan 2025," kata Warsubi di Jombang, dilansir kumparan, Kamis (14/8/2025).

"Kami hanya menjalankan. Kami tidak pernah menaikkan pajak. Kami hanya menjalankan apa yang sudah dijalankan di tahun 2024. Nah, kami kan juga belum menjabat. Tapi kami harus meneruskan perjuangan-perjuangan beliau," ucapnya.

Untuk itu, Warsubi memberikan opsi pengajuan keberatan bagi warga yang merasa PBB-P2 naik terlalu tinggi. Ia menjelaskan, sejauh ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang telah melayani pengajuan pengurangan atau peninjauan ulang dari warga yang merasa keberatan dengan tarif PBB-P2.

Kemudian, Warsubi menjanjikan tidak ada kenaikan PBB-P2 untuk periode tahun 2026-2027. "Tapi kami berkomitmen tidak menaikkan pajak PBB-P2 tahun 2026. Bahkan 2027 saya tak jamin tidak ada kenaikan, jangan khawatir, 2026-2027. Kalau naik,

ketemu Pak Bupati atau ke Bapenda akan saya tunjukkan caranya," katanya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menanggapi kenaikan PBB di Kabupaten Jombang yang memicu keresahan masyarakat. Emil menjelaskan bahwa keputusan kenaikan tersebut diambil sebelum Bupati baru menjabat. Oleh karena itu, Bupati saat ini membutuhkan waktu untuk mempelajari detailnya.

Menurut Emil, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang. Ia menekankan pentingnya melayani setiap pertanyaan masyarakat terkait penilaian objek pajak dan membuka ruang selebar-lebarnya untuk mengevaluasi hasil penilaian tersebut. "Kami berkomunikasi bahwa siapapun yang punya pertanyaan terkait penilaian objek pajak ini harus dilayani sebaik-baiknya," ujar Emil di Gedung Negara Graha, Kamis (14/8/2025).

Emil menjelaskan bahwa penilaian independen terhadap NJOP adalah program baku yang seharusnya dijalankan oleh dinas atau badan pendapatan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa ruang untuk mengajukan keberatan bagi pemilik properti atau tanah tetap terbuka lebar.

Terkait dengan polemik kenaikan PBB tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengumpulkan seluruh kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur di seluruh Indonesia dalam rapat via daring. Tito selaku Mendagri mengidentifikasi sejumlah pemerintah daerah yang telah menaikkan PBB secara langsung atau tidak bertahap.

"Nah, saya sekarang siang ini akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang terjadi kenaikan," ujar Tito saat acara di Gudang Bulog, Jakarta Utara, dilansir beritanasional, Kamis (14/5/2025).

Tito mengakui kalau kenaikan PBB memang tidak berkoordinasi dengan Kemendagri, melainkan hanya sampai tataran Gubernur. Tetapi, dia mengingatkan keputusan itu dilaksanakan sesuai UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat Daerah) dan aturan turunannya.

"Penentuan angka NJOP dan PBB itu ditentukan oleh bupati dan wali kota dengan konsultasi dan yang mereview adalah gubernur. Makanya, gak sampai ke saya ya, tapi gubernur," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, mengatakan kebijakan penaikan PBB-P2 tersebut merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah. (han,ist/lut)



DIRGAHAYU

REPUBLIK INDONESIA

17 AGUSTUS 1945 -17 AGUSTUS 2025

80

**Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju**



Adi Sutarwijono
Ketua DPRD Kota Surabaya

Bahtiar Rifai
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

Laila Mufidah
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

Arif Fathoni
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya